

IMPLEMENTASI IDEOLOGI POLITIK AL WASHLIYAH PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA

Leo Kusuma, Magdalena

UIN Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan, Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Dualisme sistem pendidikan nasional menuntut lembaga pendidikan Islam beradaptasi dengan dua sistem administrasi tanpa kehilangan identitas ideologisnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ideologi politik Al Jam'iyatul Washliyah dalam sistem pendidikan Islam di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, serta strategi organisasi dalam mempertahankan identitasnya pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pengurus Al Washliyah, kepala sekolah, guru, dan tokoh masyarakat. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi Al Washliyah diimplementasikan melalui integrasi nilai-nilai ke-Al Washliyah dalam kurikulum, penguatan kaderisasi organisasi, serta diferensiasi orientasi pembelajaran antara madrasah yang berfokus pada pendalaman ilmu-ilmu keislaman dan sekolah umum yang menanamkan nilai organisasi melalui budaya sekolah dan muatan lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa Al Washliyah berperan sebagai organisasi pendidikan berbasis masyarakat yang mereproduksi nilai-nilai ideologis secara adaptif dalam dua sistem pendidikan nasional. Kebaruan penelitian terletak pada pengungkapan model adaptasi ideologis Al Washliyah dalam mempertahankan identitas organisasi melalui pengelolaan pendidikan di bawah dua kementerian yang berbeda.

Kata Kunci: Al Jam'iyatul Washliyah, Ideologi Politik, Pendidikan Islam, Dualisme Pendidikan, Adaptasi Ideologis.

Abstract

The dualism of Indonesia's national education system requires Islamic educational institutions to adapt to two different administrative systems while maintaining their ideological identity. This study aims to analyze the implementation of Al Jam'iyatul Washliyah's political ideology within the Islamic education system in Bandar District, Simalungun Regency, and to examine the organization's strategy for preserving its ideological identity in educational institutions under the Ministry of Religious Affairs and the Ministry of Education. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and document analysis involving Al Washliyah administrators, school principals, teachers, and community leaders. Data trustworthiness was ensured through source and technique triangulation, while data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that Al Washliyah's political ideology is implemented through the integration of Al Washliyah values into the curriculum, the strengthening of organizational cadre development, and differentiated educational orientations between madrasahs, which emphasize Islamic sciences, and general schools, which promote organizational values through school culture and local content. These findings demonstrate that Al Washliyah functions as a community-based educational organization that adaptively reproduces its ideological values across two national education systems. The novelty of this study lies in identifying Al Washliyah's model of ideological adaptation in maintaining its organizational identity while managing educational institutions under two different ministerial authorities.

Keywords: Al Jam'iyatul Washliyah, Political Ideology, Islamic Education, Educational Dualism, Ideological Adaptation.

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia secara historis terjebak dalam dikotomi sistemik yang memisahkan antara pendidikan agama (madrasah) dan pendidikan umum (sekolah). Dualisme ini menciptakan segregasi administratif di mana madrasah bernaung di bawah



Kementerian Agama, sementara sekolah umum berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.¹

Di tengah fragmentasi ini, organisasi Al Jam'iyatul Washliyah muncul sebagai aktor politik pendidikan yang unik. Dalam penelitian ini, istilah **aktor politik pendidikan** dimaknai sebagai organisasi masyarakat sipil yang memengaruhi arah pendidikan melalui pengembangan kurikulum, kaderisasi, internalisasi nilai, dan pengelolaan lembaga pendidikan, bukan sebagai aktor politik praktis atau pelaku advokasi kebijakan publik. Dengan demikian, dimensi politik yang dimaksud merujuk pada proses reproduksi dan transmisi nilai-nilai ideologis organisasi melalui institusi pendidikan. Sejak berdirinya pada tahun 1930, Al Washliyah telah menunjukkan eksistensi yang kuat dalam mempertahankan tipologi pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan regulasi pemerintah.²

Di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dualisme sistem pendidikan nasional tercermin pada keberadaan lembaga pendidikan Al Washliyah yang beroperasi di bawah Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan. Kondisi ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengadaptasikan tata kelola kelembagaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan administratif masing-masing kementerian, tanpa mengabaikan identitas ideologisnya. Dengan demikian, keberadaan jaringan lembaga pendidikan tersebut tidak hanya mencerminkan perluasan akses layanan pendidikan, tetapi juga menjadi strategi organisasi dalam mentransmisikan nilai-nilai ke-Al Washliyah melalui dua sistem pendidikan yang berbeda. Keberadaan sekolah-sekolah ini mencerminkan fleksibilitas ideologi politik organisasi dalam menavigasi kebijakan negara.

Berbagai penelitian telah mengkaji Al Jam'iyatul Washliyah dari beragam perspektif. Penelitian Nisa dkk. mengungkap eksistensi, tipologi, dan perkembangan lembaga pendidikan Al Washliyah sejak tahun 1930 hingga 2000 dengan menekankan kemampuan organisasi dalam mempertahankan keberlangsungan lembaga pendidikan di tengah perubahan sosial dan kebijakan pemerintah.³ Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada perkembangan historis kelembagaan dan belum menjelaskan bagaimana

¹ Ety Kurniyat, "MEMAHAMI DIKOTOMI DAN DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.669>.

² Khairun Nisa dkk., "Al-Jam'iyatul Al-Washliyah Educational Institutions (1930-2000): Existence, Typology of Education, and Its Issues," *Yupa: Historical Studies Journal* 8, no. 1 (2024): 124-39, <https://doi.org/10.30872/yupa.v8i1.3143>.

³ Khairun Nisa and others, 'Al-Jam'iyatul Al-Washliyah Educational Institutions (1930-2000): Existence, Typology of Education, and Its Issues', *Yupa: Historical Studies Journal*, 08.01 (2024), 124-39 <https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fjurnal.fkip.unmul.ac.id%2Findex.php%2Fyupa?_tp=eyJjb250ZXh0ljp7ImZpcnNOUGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19>.

ideologi organisasi diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, Ja'far menjelaskan bahwa Al Washliyah mengembangkan corak Islamisme moderat yang memungkinkan organisasi bersikap kooperatif terhadap negara tanpa meninggalkan identitas keislamannya.⁴ Meskipun demikian, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada pemikiran politik organisasi dan belum mengaitkannya dengan praktik pengelolaan lembaga pendidikan. Dari aspek kurikulum, penelitian Purba menunjukkan bahwa kurikulum diniyah Al Washliyah berfungsi sebagai instrumen internalisasi nilai-nilai organisasi pada madrasah. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya berfokus pada pengembangan kurikulum di lingkungan madrasah dan belum membandingkan implementasinya pada sekolah umum. Sementara itu, penelitian Hanum membahas kontribusi Al Washliyah dalam pengembangan pendidikan melalui peran perempuan.⁵ Sedangkan Nurul Hidayat dkk menjelaskan persoalan dualisme pendidikan Islam di Indonesia sebagai konsekuensi pemisahan sistem pendidikan agama dan pendidikan umum.⁶ Beberapa penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana organisasi masyarakat Islam mengintegrasikan identitas ideologisnya dalam dua sistem pendidikan yang berbeda.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, masih terdapat ruang penelitian mengenai strategi adaptasi ideologis Al Washliyah dalam mengelola lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menjelaskan model implementasi ideologi politik Al Washliyah melalui integrasi kurikulum, kaderisasi organisasi, dan tata kelola pendidikan pada dua sistem administrasi pendidikan nasional di tingkat lokal. Meskipun penelitian mengenai kurikulum Al Washliyah dan peran perempuan dalam lembaga pendidikannya telah banyak dilakukan, masih terdapat celah penelitian (research gap) mengenai bagaimana ideologi politik organisasi ini diterjemahkan dalam pengelolaan sekolah yang berada di bawah dua kementerian berbeda di tingkat kecamatan.

Penelitian ini menjadi penting karena bertujuan untuk menganalisis strategi adaptasi dan integrasi nilai Al Washliyah dalam menghadapi dualisme sistem pendidikan

⁴ Ja'far, 'Al Jam'iyatul Washliyah, Agama Dan Politik', *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 3.1 (2022), 1-18 <<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/islamijah/article/view/8999>>.

⁵ Latifah Hanum, 'Perempuan Di Lembaga Pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah', *JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMAND MUSLIM SOCIETIES*, 2.1 (2018), 29-49 <<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JCIMS/article/view/1755>>.

⁶ Nurul Hidayati, Abdul Muhid, and Iksan Kamil Sahri, 'Educational Dualism in Indonesia: Systematic Literature Review', *Jurnal Tarbiyatuna*, 14.2 (2023), 130-46 <<https://journal.unimma.ac.id/index.php/tarbiyatuna/index>>.

nasional.⁷ Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai politik pendidikan Islam di Indonesia, khususnya bagaimana organisasi masyarakat Islam mampu berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa baik melalui jalur pendidikan umum maupun keagamaan dengan pendekatan yang pragmatis namun tetap ideologis.⁸

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi fenomena ideologi dan praktik pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Sesuai dengan perspektif Sugiyono, metode kualitatif ditempatkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati secara alamiah.⁹ Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*key instrument*) yang terjun langsung ke lapangan untuk menangkap makna di balik strategi politik pendidikan dan moderasi beragama yang diterapkan oleh organisasi tersebut.¹⁰

Dalam menentukan sumber data, penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling*. Sebagaimana dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, teknik ini dilakukan dengan memilih subjek penelitian berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut erat dengan populasi yang telah diketahui sebelumnya.¹¹ Informan yang dipilih meliputi pimpinan cabang Al Washliyah Simalungun, pengelola lembaga pendidikan (kepala sekolah dan guru), serta tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika institusi tersebut. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan, sementara data sekunder mencakup dokumen kurikulum diniyah, profil organisasi, dan arsip manajemen sekolah seperti standar ISO 9001:2015.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan. Peneliti melakukan observasi partisipatif untuk melihat implementasi nilai-nilai inklusivitas di lingkungan sekolah, melakukan wawancara mendalam untuk menggali strategi sinkronisasi kurikulum, serta melakukan studi dokumentasi terhadap naskah-naskah kebijakan organisasi. Penggunaan berbagai teknik

⁷ Latifah Hanum, "PEREMPUAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN AL JAM'IYATUL WASHLIYAH," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 2, no. 1 (2018): 29-49, <https://doi.org/10.30821/jcims.v2i1.1755>.

⁸ Nisa dkk., "Al-Jam'iyatul Al-Washliyah Educational Institutions (1930-2000)."

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.6

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Ed.2, Cet. 25 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.76

¹¹ Suharsimi Arikunto dan V. I. Edisi Revisi, "3.1 Jenis Dan Sumber Data," nd, t.t., diakses 16 Juni 2026, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2057/>.

ini bertujuan untuk menyilangkan data sehingga diperoleh kebenaran informasi yang objektif mengenai eksistensi Al Washliyah sebagai agen perubahan di Simalungun.¹²

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan merujuk pada model Miles dan Huberman. Tahapan analisis dimulai dari reduksi data, di mana peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data pada tema-tema krusial seperti pragmatisme politik dan modernisme adaptif.¹³ Selanjutnya, data disajikan (*data display*) secara naratif dan sistematis untuk memperlihatkan hubungan antar fenomena pendidikan yang ditemukan di lapangan.¹⁴ Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan proposisi akhir mengenai bagaimana Al Washliyah menjembatani dualisme pendidikan melalui integrasi epistemologis yang inklusif dan progresif.¹⁵

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dialektika Ideologi Politik: Pragmatisme Islamisme Moderat Al Washliyah

Ideologi politik Al Jam'iyatul Washliyah tidaklah bersifat kaku atau konfrontatif terhadap negara, melainkan manifestasi dari Islamisme Moderat yang menempatkan pendidikan sebagai medan perjuangan utama.¹⁶ Dalam lanskap politik pendidikan di Indonesia, Al Washliyah menunjukkan apa yang disebut sebagai *political pragmatism*—sebuah kemampuan untuk menavigasi kepentingan ideologis organisasi di dalam bingkai sistem pendidikan nasional yang sering kali bersifat sekuler-birokratis. Sejak berdirinya pada tahun 1930, Al Washliyah telah memposisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah yang adaptif terhadap perubahan rezim, mulai dari era kolonial hingga reformasi.¹⁷

Pendalaman terhadap dialektika ideologi ini di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, terkonfirmasi melalui perspektif pelaku organisasi di lapangan. Dalam wawancara mendalam dengan Bapak D. Sinaga, Sekretaris Gerakan Pemuda Al Washliyah Simalungun, terungkap bahwa ideologi politik Al Washliyah

¹² Imron Bima Saputra dan Muhammad Luthfie Ramadhani, "PEMBERDAYAAN UMAT MELALUI AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH DI SUMATERA UTARA," *JURNAL PENGABDIAN MANDIRI* 3, no. 12 (2024): 1299-316, <https://doi.org/10.53625/jpm.v3i12.9485>.

¹³ Oman Sukmana dkk., *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Konseptual dan Praktis* (Star Digital Publishing, 2025), hlm. 69

¹⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33-54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁵ Rachmat Hidayat dkk., "Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data Dan Penyimpulan/Pemaknaan, Dan Pelaporan & Evaluasi Penelitian," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 509-23.

¹⁶ Ja'far, J. (2019). PEMIKIRAN POLITIK ISLAMISME MODERAT AL JAM'İYATUL WASHLIYAH. *Al-A Raf Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 16(2), 191-191. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i2.1762>

¹⁷ Solihah Titin Sumantri dkk., "Pendidikan Islam, Modernisasi Dan Kolonialisasi: Transformasi Lembaga Pendidikan Jam'iyatul Washliyah Tahun 1930-1942," *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 16, no. 1 (2021): 157-74, <https://doi.org/10.19105/tjpi.v16i1.4659>.

memiliki pengaruh yang sangat determinan terhadap arah dan kualitas pendidikan Islam di wilayah tersebut. Beliau menjelaskan bahwa ideologi organisasi ditransformasikan ke dalam visi operasional yang bersifat multidimensional:

*"Ideologi Al Washliyah di Kecamatan Bandar diwujudkan melalui visi besar untuk menciptakan organisasi yang tidak hanya unggul dalam aspek pendidikan, tetapi juga militan dalam dakwah, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, mandiri secara ekonomi, serta konsisten melahirkan kader-kader yang militan melalui sistem kaderisasi yang terintegrasi di setiap jenjang pendidikan."*¹⁸

Secara akademik, visi yang disampaikan oleh Bapak D. Sinaga menunjukkan bahwa Al Washliyah di Simalungun tidak memandang pendidikan sebagai entitas yang terisolasi. Sebaliknya, pendidikan adalah motor penggerak bagi kesejahteraan ekonomi dan stabilitas sosial umat. Istilah "kader militan" dalam konteks ini bukan merujuk pada radikalisme, melainkan pada pembentukan individu yang memiliki loyalitas tinggi terhadap pilar-pilar organisasi serta memiliki kompetensi profesional untuk bersaing di pasar kerja global.¹⁹ Fleksibilitas ideologis ini terlihat jelas dari strategi Al Washliyah dalam menembus dua payung administratif besar di Indonesia: Kementerian Agama dan Kemendikdasmen.

Penetrasi ini merupakan strategi politik untuk memastikan nilai-nilai organisasi—seperti pemurnian akidah dan moderasi beragama—dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terhambat oleh dikotomi sistem pendidikan yang memisahkan urusan "agama" dan "umum". Sebagaimana dianalisis dalam literatur mengenai sejarah organisasi, Al Washliyah sejak awal memang dirancang untuk "menghubungkan" (*washl*) faksi-faksi Muslim yang berserakan melalui jalur edukasi. Di Kecamatan Bandar, Al Washliyah tidak hanya mengelola madrasah untuk menjaga transmisi keilmuan Islam tradisional melalui kurikulum diniyah, tetapi juga merambah jalur sekolah umum untuk menguasai basis massa dari berbagai latar belakang aspirasi karier. Bukti lapangan di SMK Al Washliyah 2 Perdagangan menunjukkan strategi "subversi kreatif" terhadap standarisasi negara. Meskipun sekolah ini patuh pada standar mutu nasional dan internasional (seperti sertifikasi ISO 9001:2015), mereka tetap mengintegrasikan "kurikulum kekhasan organisasi" sebagai instrumen pembentuk identitas. Hal ini memastikan bahwa setiap lulusan—baik teknisi maupun praktisi kesehatan—memiliki "ruh" ke-Al-Washliyah-an yang kuat. Kekuatan ideologi politik Al Washliyah di Simalungun juga terletak pada sifatnya yang inklusif namun tetap memegang teguh identitas. Karakteristik politik yang cenderung kooperatif dan moderat (*wasathiyah*)

¹⁸ Wawancara dengan Bapak D. Sinaga, Sekretaris GPA Simalungun, 1 Juni 2026

¹⁹ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Membangun kesadaran inklusif-multikultural untuk deradikalisasi pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2013): 131-51.

memungkinkannya diterima oleh masyarakat Simalungun yang heterogen.²⁰ Praktik di SMP Al Jam'iyatul Washliyah yang menerima siswa non-muslim dan melibatkan tenaga pendidik lintas agama menunjukkan bahwa organisasi ini menggunakan pendidikan sebagai alat integrasi sosial. Secara teoretis, ini adalah bentuk politik pengakuan (*politics of recognition*) di mana lembaga pendidikan Islam bertransformasi menjadi ruang publik inklusif yang memperkuat ketahanan sosial di tingkat lokal.²¹

Selain itu, Al Washliyah berperan sebagai organisasi "*agent of change*" di wilayah pedesaan seperti Nagori Tegal Rejo. Kehadiran SD Swasta Al Washliyah di daerah tersebut memberikan aksesibilitas pendidikan yang terjangkau namun bermutu tinggi, yang secara sosiopolitik menempatkan organisasi sebagai aktor non-negara yang mengambil alih peran pemerintah dalam penyediaan layanan dasar. Kesuksesan alumni MAS Al Washliyah yang mampu menembus sektor legislatif dan posisi politik strategis lainnya menegaskan bahwa model pendidikan yang fleksibel ini adalah mesin mobilitas sosial yang efektif bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, dialektika ideologi Al Washliyah di Kecamatan Bandar berhasil menciptakan sintesis antara identitas keagamaan yang konservatif dalam akidah dan metodologi pendidikan yang progresif-modern. Hal ini sejalan dengan tesis bahwa Al Washliyah merupakan model "Islamisme Moderat" yang mampu menjawab tantangan integrasi bangsa dan profesionalisme di era disrupsi informasi. Poin-poin visi yang disampaikan oleh Bapak D. Sinaga mempertegas bahwa keberlangsungan organisasi sangat bergantung pada kemampuannya menyelaraskan militansi kader dengan kemanfaatan sosial-ekonomi bagi umat luas.

2. Transformasi Modernitas: Jalur Kemendikdasmen dan Standarisasi Global

Pada jalur pendidikan umum yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Al Jam'iyatul Washliyah di Kecamatan Bandar melakukan akselerasi strategis melalui profesionalisme manajemen yang melampaui sekat-sekat tradisionalisme organisasi. Fenomena ini merepresentasikan sebuah "modernisme adaptif," di mana organisasi mampu mengadopsi struktur birokrasi dan standar mutu global tanpa mereduksi fundamen ideologisnya.²² Sebagaimana dianalisis dalam literatur sejarah dan perjuangan organisasi oleh Imam Yazid, esensi "Al-Washliyah"

²⁰ Mhd Syahnan dan Ja'far Ja'far, "EXAMINING RELIGIOUS MODERATION OF THE AL-JAM'IYATUL WASHLIYAH FATWA COUNCIL," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 15, no. 1 (2021): 21-46, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.1.21-46>.

²¹ Rhohis Kurniawan dan Suparto Suparto, "Dakwah Moderasi dan Kebangsaan: Strategi Al-Jam'iyatul Washliyah dalam Menguatkan Wawasan Kebangsaan di Era Disrupsi," *Ad-DA'WAH* 23, no. 2 (2025): 76-94, <https://doi.org/10.59109/addawah.v23i2.154>.

²² Hanum, "PEREMPUAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN AL JAM'IYATUL WASHLIYAH."

(menghubungkan) diwujudkan melalui kerja nyata (*Amal*) yang mengintegrasikan tuntutan zaman dengan prinsip-prinsip syariat.²³ Transformasi ini menunjukkan bahwa Al Washliyah telah berhasil mengonversi modal sosial-keagamaan menjadi modal institusional yang kompetitif di tingkat nasional maupun global. Dialektika modernitas ini tidak terlepas dari pengaruh ideologi politik organisasi yang meresap ke dalam sistem pendidikan di Simalungun. Bapak D. Sinaga, selaku Sekretaris Gerakan Pemuda Al Washliyah, memberikan perspektif mendalam mengenai bagaimana visi politik organisasi menstimulasi transformasi edukatif tersebut:

“Pengaruh ideologi politik Al Jam’iyatul Washliyah terhadap diskursus pendidikan Islam di Kecamatan Bandar termanifestasi dalam upaya sistematis untuk mewujudkan entitas yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga militan dalam dakwah dan memiliki resiliensi sosial-ekonomi. Kami mengonstruksi sebuah paradigma pendidikan yang berorientasi pada pencetakan kader militan; individu yang memiliki integritas ideologis yang tak tergoyahkan namun dibekali dengan kecakapan profesional untuk menguasai sektor-sektor strategis. Visi ini merupakan komitmen organisasi untuk menghadirkan kemaslahatan publik yang konkret melalui pemberdayaan umat yang komprehensif.”²⁴

Secara sosiologis, pernyataan tersebut mengonfirmasi bahwa Al Washliyah di Simalungun menggunakan institusi pendidikan sebagai laboratorium kaderisasi yang memadukan spiritualitas dengan profesionalisme. Hal ini diperkuat oleh unit SMK Al Washliyah yang menjadi model "rekayasa kualitas" melalui penerapan standar ISO 9001:2015. Penegasan mengenai pentingnya standarisasi global ini disampaikan oleh Ibu Khoirunnisah dengan terminologi yang lebih akademis:

“Eksistensi SMK Al Washliyah dalam skema pendidikan nasional di bawah Kemendikdasmen diwujudkan melalui sinkronisasi standar manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015. Langkah strategis ini diambil untuk menjamin bahwa proses pedagogis yang berlangsung tidak hanya memenuhi standar kejuruan industri yang ketat, tetapi juga tetap terintegrasi secara holistik dengan nilai-nilai luhur keislaman yang menjadi distingsi utama organisasi kami.”²⁵

Diversifikasi kejuruan seperti rekayasa perangkat lunak dan akuntansi digital dipandang oleh Bapak Syawal sebagai respon terhadap tantangan *human capital* di era disrupsi. Beliau menekankan bahwa inovasi kurikulum ini bertujuan untuk mengeluarkan masyarakat Simalungun dari stagnasi dikotomi pendidikan.²⁶ Sejalan dengan pemikiran Komarudin mengenai dinamika organisasi, Al Washliyah memosisikan dirinya sebagai jembatan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan pemeliharaan tradisi intelektual

²³ MOH MISBAKUL MUNIR, *HEGEMONI WACANA KEAGAMAAN DI UIN WALISONGO (ANALISIS SIMBIOSIS MUTUALISME POLITIK NAHDLATUL ‘ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH DI UIN WALISONGO SEMARANG)*, t.t., diakses 16 Juni 2026, <https://eprints.walisongo.ac.id/15122/1/all%20skripsi%20-%20Misbskhul%20Munir.pdf>.

²⁴ Wawancara dengan Bapak D. Sinaga, *Sekretaris GPA Simalungun*, 1 Juni 2026

²⁵ Wawancara dengan Ibu Khoirunnisah, *Guru SMK Al Washliyah*, 2 Juni 2026

²⁶ Wawancara dengan Bapak Syawal, *Alumni SMK Al Washliyah*, 3 Juni 2026

Islam.²⁷ Lebih jauh lagi, dimensi inklusivitas politik pendidikan Al Washliyah terefleksi secara mendalam di SMP Al Jam'iyatul Washliyah melalui praktik religiusitas Inklusif. Ibu Teri menjelaskan bagaimana ekosistem sekolah umum ini dikelola sebagai ruang artikulasi moderasi beragama:

*“Kami mengonstruksi lingkungan pendidikan yang inklusif sebagai pengejawantahan dari nilai pluralisme edukatif. Dengan menyediakan tenaga pendidik lintas agama, SMP Al Jam'iyatul Washliyah menjalankan fungsi pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang harmonis dengan identitas Islam moderat. Hal ini memastikan bahwa moderasi beragama bukan sekadar wacana teoritis, melainkan praktik keseharian dalam ekosistem persekolahan kami. Moderasi beragama di sini bukan sekadar wacana simbolis, melainkan dialektika praksis yang mendewasakan karakter kebangsaan siswa dalam bingkai kebinekaan yang fungsional.”*²⁸

Analisis ini menunjukkan bahwa melalui jalur Kemendikdasmen, Al Washliyah di Kecamatan Bandar telah berhasil melakukan integrasi epistemologis yang kokoh. Mereka membuktikan bahwa resiliensi sekolah Islam terletak pada kemampuannya mengadopsi standar kualitas global dan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif tanpa kehilangan jati diri ideologisnya. Fleksibilitas ini memperkuat posisi Al Washliyah sebagai pilar stabilitas sosial yang mampu menjembatani kebutuhan tenaga kerja profesional dengan pembentukan karakter manusia yang religius, moderat, dan progresif.²⁹

3. Konservasi Intelektual-Agama: Jalur Kemenag dan Kaderisasi Ulama

Berbeda dengan orientasi teknokratis pada jalur pendidikan umum, institusi di bawah naungan Kementerian Agama, seperti Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Washliyah Perdagangan, berfungsi sebagai episentrum konservasi intelektual-spiritual dan penguatan identitas kearifan lokal Al Washliyah. Analisis kurikulum menunjukkan bahwa madrasah-madrasah ini menerapkan strategi integrasi epistemologis yang sangat ketat antara kurikulum nasional Kementerian Agama dengan kurikulum diniyah (khusus) organisasi. Kurikulum diniyah ini bukan sekadar tambahan, melainkan jantung dari identitas Al Washliyah yang menekankan pada penguasaan *turath* (kitab kuning) dan filologi bahasa Arab sebagai instrumen utama dalam menjaga transmisi keilmuan Islam tradisional di tengah arus modernitas yang mendisrupsi otoritas keagamaan.³⁰

²⁷ Solechan, dan Siti Ma'rifah. 2023. “Pengembangan Dan Inovasi Kurikulum Di MA At-Taufiq Grogol Diwrek Jombang.” *Urwatul Wutsqo Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 12 (1): 112-27. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i1.845>.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Teri, Guru SMP Aljamiatul Washliyah Marihat Bandar, 4 Juni 2026

²⁹ Kurniawan dan Suparto, “Dakwah Moderasi dan Kebangsaan.”

³⁰ Mursal Aziz dkk., “Kebijakan Majelis Pendidikan Al-Washliyah Dalam Pengembangan Kurikulum Ke-Al Washliyah Madrasah Aliyah Di Sumatera Utara,” *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 9, no. 1 (2019), <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/article/view/3102>.

Internalisasi nilai-nilai keagamaan ini tidak hanya bertujuan untuk eskalasi kapasitas kader dalam ranah klerikal (praktisi agama), tetapi juga sebagai strategi politik organisasi untuk melahirkan subjek hukum yang memiliki kapasitas kepemimpinan di ruang publik. Terkait hal ini, Bapak Mahdanil dari MAS Al Washliyah memberikan elaborasi akademis mengenai profil lulusan yang dikonstruksi oleh institusinya:

“Institusi madrasah kami dikonstruksi sebagai episentrum kaderisasi yang bersifat multidisipliner dan multidimensi. Kami mengikuti kurikulum sesuai dengan kebijakan majelis Pendidikan Al Washliyah yang tidak hanya memproyeksikan lulusan untuk mengabdikan dan berkarya di Kementerian Agama, tetapi juga menyiapkan mereka sebagai ‘agent of change’ yang kompetitif di birokrasi pemerintahan, tokoh politik nasional, hingga menempati posisi strategis di badan legislatif. Hal ini dimungkinkan melalui sinkronisasi antara integritas moral-teologis dengan penguatan ‘soft skills’ seperti retorika publik dan kepemimpinan politik (leadership) yang berbasis pada etika Islam moderat.”³¹

Analisis ini menunjukkan bahwa madrasah Al Washliyah di Kecamatan Bandar menjalankan fungsi sebagai Inkubator Politik yang efektif. Keberhasilan alumni dalam menembus ranah legislatif dan birokrasi negara membuktikan adanya penerapan *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi) yang mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa tanpa kehilangan jati diri sebagai pejuang organisasi. Hal ini memperkuat tesis Ja’far bahwa politik Al Washliyah adalah “politik pengabdian” yang berbasis pada penguatan basis sosiologis melalui pendidikan, di mana madrasah menjadi rahim bagi lahirnya elit Muslim moderat yang mampu melakukan negosiasi identitas di ruang sekuler.³²

Di tingkat menengah pertama, MTSS Al Washliyah Perdagangan menerapkan pendekatan sosiologis melalui disiplin spiritual sebagai antitesis terhadap dekadensi moral global. Ibu Hafni, salah satu tenaga pendidik di institusi tersebut, memberikan penegasan mengenai mekanisme kontrol sosial yang diterapkan:

“Internalisasi nilai melalui pembiasaan ritus ibadah harian merupakan mekanisme kontrol sosial yang fundamental dalam struktur pedagogis kami. Di tengah penetrasi sekularisasi dan degradasi moralitas di era digital, fokus pada ‘habitual action’ ibadah rutin berfungsi sebagai instrumen sosiologis untuk memelihara integritas moral generasi muda. Kami berupaya membentuk karakter yang tidak hanya disiplin secara lahiriah, tetapi juga memiliki ketangguhan spiritual (spiritual resilience) dalam menghadapi kompleksitas sosial kontemporer.”³³

Strategi ini merupakan respon langsung terhadap tantangan dualisme pendidikan di Indonesia yang sering kali menciptakan dikotomi tajam antara kecerdasan kognitif dan kemantapan spiritual. Dengan mengintegrasikan pembiasaan ibadah ke dalam

³¹ Wawancara dengan Bapak Mahdanil, Guru MAS Aljamiyatul Washliyah, 5 Juni 2026

³² Ja’far, “AL JAM’IYATUL WASHLIYAH, AGAMA DAN POLITIK.”

³³ Wawancara dengan Ibu Hafni, Guru MtsS Aljamiyatul Washliyah, 6 Juni 2026

struktur kurikulum formal, Al Washliyah di Simalungun berhasil menciptakan model pendidikan yang resisten terhadap dampak negatif sekularisasi. Secara akademik, model ini mengonfirmasi bahwa Al Washliyah tidak hanya berperan dalam konservasi agama secara statis, tetapi melakukan dinamisasi kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan sosial-politik kontemporer. Dengan demikian, madrasah Al Washliyah tetap menjadi garda terdepan dalam mencetak pemimpin masa depan yang memiliki kemandirian intelektual dan integritas *akhlakul karimah* yang kokoh.

4. Integrasi dan Responsitas Masyarakat: Sintesis Pendidikan Tanpa Sekat

Keunggulan fundamental Al Jam'iyatul Washliyah di Kecamatan Bandar terletak pada kemampuannya dalam mengeliminasi sekat dikotomi pendidikan yang secara sistemik memisahkan antara dimensi sakral (*agama*) dan profan (*umum*). Meskipun secara administratif institusi-institusi ini bernaung di bawah dua otoritas berbeda Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah—secara ideologis keduanya tetap berada dalam "satu komando" kepemimpinan Pengurus cabang Al Washliyah. Strategi ini merupakan bentuk unifikasi ideologis yang memastikan bahwa visi organisasi untuk mencetak manusia yang religius sekaligus intelek tetap terjaga secara konsisten di semua jenjang pendidikan. Dalam tataran praktis di tingkat pendidikan dasar, Pak Bambang dari SD Swasta Al Washliyah Tegal Rejo memberikan penegasan terkait sinkronisasi kurikulum ini dalam perspektif sosiologis yang mendalam:

*"Eksistensi lembaga pendidikan kami di tingkat dasar sangat bergantung pada kemampuan melakukan sinkronisasi kurikulum Kemendikdasmen dengan nilai-nilai moralitas serta akidah khas Al Washliyah. Penyelarasan ini bukan sekadar tambahan muatan lokal, melainkan upaya sadar untuk membangun fondasi karakter siswa sejak dini, yang menjadi faktor determinan utama di balik tingginya tingkat kepercayaan dan keberterimaan masyarakat terhadap model pendidikan kami."*³⁴

Secara teoretis, keberhasilan Al Washliyah dalam mempertahankan eksistensinya sejak tahun 1930-an merupakan manifestasi dari pembangunan Modal sosial (*social capital*) yang sangat kokoh.³⁵ Pandangan Ibu Mila dan Bapak Supardan sebagai representasi masyarakat umum menunjukkan bahwa institusi Al Washliyah telah melewati fase legitimasi tradisional menuju legitimasi profesional. Masyarakat tidak lagi memandang Al Washliyah hanya sebagai organisasi keagamaan tua yang bersifat konservatif, tetapi sebagai lembaga yang "teruji di lapangan" dalam mentransformasikan

³⁴ Wawancara dengan Bapak Bambang, Guru SD Aljamiatul Washliyah Tegal Rejo, 7 Juni 2026

³⁵ Riswan Rambe, "Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia pada Era Pra Kemerdekaan," *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan* 2, no. 1 (2018).

siswa menjadi individu yang memiliki keseimbangan antara kesalehan spiritual dan kecakapan teknis-profesional.³⁶

Hal ini selaras dengan temuan Ja'far yang menyatakan bahwa kekuatan politik-sosial Al Washliyah berakar pada kemampuannya untuk tetap relevan dengan kebutuhan sosiologis masyarakat lokal melalui jalur pendidikan yang adaptif. Analisis sosiologis menunjukkan bahwa Al Washliyah telah berhasil membangun kepercayaan publik (*social trust*) yang tinggi di Simalungun melalui konsistensi pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas selama hampir satu abad. Responsivitas ini membuktikan bahwa Al Washliyah tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa pendidikan, tetapi sebagai Katalisator Integrasi Sosial. Dengan menyediakan akses pendidikan yang berkualitas baik di jalur madrasah maupun sekolah umum, Al Washliyah memberikan pilihan mobilitas vertikal bagi masyarakat pedesaan tanpa harus meninggalkan identitas religius mereka. Integrasi ini memungkinkan masyarakat di Kecamatan Bandar untuk mendapatkan pendidikan kejuruan yang modern tanpa kehilangan sentuhan pendidikan karakter berbasis Islamisme moderat. Pada akhirnya, sintesis pendidikan tanpa sekat ini menjadikan Al Washliyah sebagai pilar stabilitas sosial-keagamaan di Simalungun yang mampu menjawab tantangan modernitas melalui integrasi nilai-nilai keislaman moderat dan standar pendidikan nasional yang progresif.

5. Sinergi Kebangsaan dan Moderasi Beragama: Penguatan Wawasan Kebangsaan di Era Disrupsi

Dimensi terakhir yang mengukuhkan posisi Al Jam'iyatul Washliyah di Kecamatan Bandar adalah perannya yang sangat krusial sebagai benteng ideologis dalam penguatan wawasan kebangsaan yang integratif. Di tengah eskalasi disrupsi informasi yang sering kali memicu polarisasi serta penetrasi ancaman radikalisme, Al Washliyah mentransformasikan seluruh institusi pendidikannya menjadi ruang penyemaian nilai-nilai *Wasathiyah* atau moderasi beragama secara sistemik. Hal ini membuktikan bahwa politik pendidikan yang dijalankan oleh Al Washliyah tidak hanya berorientasi pada kepentingan sektarian atau penguatan internal organisasi semata, melainkan didedikasikan secara penuh untuk menjaga stabilitas nasional dan kohesi sosial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷ Strategi penguatan wawasan kebangsaan ini diimplementasikan melalui mekanisme internalisasi karakter moderat yang

³⁶ Wawancara dengan Ibu Mila dan Bapak Supardan, *Masyarakat Umum*, 8 Juni 2026

³⁷ Masyhuril Khamis, *Al Washliyah Menuju 1 Abad: Histori, Ideologi dan Resistansi di Era Disrupsi* (Centre For Al Washliyah Studies, 2022), hlm. 28

terintegrasi dalam kurikulum dan pembiasaan harian di madrasah maupun sekolah umum. Dengan mengonstruksi identitas kader yang mencintai tanah air sebagai manifestasi dari iman atau *hubbul wathan minal iman*, Al Washliyah menciptakan sebuah resiliensi ideologis yang memberikan warga organisasi ketahanan terhadap infiltrasi paham transnasional yang ekstrem.³⁸

Lebih lanjut, Al Washliyah berhasil melakukan sinkronisasi epistemologis antara nilai-nilai luhur Islam dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945.³⁹ Dalam paradigma politik organisasi, eksistensi negara dipandang sebagai hasil kesepakatan agung atau *mitsaq* yang mengikat secara moral dan teologis, sehingga menjaga kedaulatan bangsa dianggap sebagai bagian dari kewajiban agama yang fundamental. Pendidikan di Al Washliyah diarahkan untuk mencetak warga negara yang memiliki loyalitas tinggi (*good citizenship*) sekaligus ketaatan religius yang mendalam, sehingga mampu mematahkan dikotomi antara identitas keislaman dan keindonesiaan. Di era digital yang penuh tantangan, strategi Al Washliyah di Simalungun difokuskan pada penguatan literasi keagamaan yang moderat dengan tetap berbasis pada otoritas keilmuan tradisional seperti *kitab kuning* sebagai filter intelektual utama dalam menyaring informasi yang mendistorsi nilai-nilai agama.

Pendekatan ini menuntut organisasi untuk tetap adaptif terhadap kemajuan teknologi tanpa mengabaikan akar tradisi yang menjadi jati dirinya.⁴⁰ Secara sosiopolitik, keseluruhan upaya ini memposisikan Al Jam'iyatul Washliyah sebagai aktor determinan dalam pemberdayaan umat dan penguatan ketahanan sosial di tingkat lokal.⁴¹ Melalui model pendidikan yang inklusif, organisasi ini mampu meredam potensi konflik horisontal dan membangun harmoni di tengah kemajemukan masyarakat Simalungun yang heterogen. Keberhasilan ini mengonfirmasi bahwa model pendidikan Al Washliyah merupakan sintesis ideal antara religiositas yang kuat dan nasionalisme yang progresif, yang pada akhirnya mengukuhkan posisi organisasi sebagai pilar stabilitas nasional yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan integrasi bangsa di masa depan.⁴²

D. Kesimpulan

³⁸ Deniansyah Damanik dkk., "Religious Moderation By Organization Of Islamic Al-Jam'iyatul Washliyah (Character, Identity, And Attitude)," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 2 (2023): 233-44, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.17089>.

³⁹ Hasaziduhu Möhö dkk., "Pancasila Sebagai Staat Fundamental Norm Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional," *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)* 5, no. 3 (2022): 194-203.

⁴⁰ Kurniawan dan Suparto, "Dakwah Moderasi dan Kebangsaan."

⁴¹ Saputra dan Ramadhani, "PEMBERDAYAAN UMAT MELALUI AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH DI SUMATERA UTARA."

⁴² Dr H. Faisal Attamimi M.Fil.I S. Ag dkk., *Studi Islam Moderat* (Divya Media Pustaka, 2026).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dialektika ideologi politik Al Jam'iyatul Washliyah di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, merupakan manifestasi dari Islamisme moderat yang berhasil mentransformasikan lembaga pendidikan menjadi instrumen perjuangan sosiopolitik yang adaptif. Keberhasilan organisasi ini berakar pada kemampuan navigasi politik yang pragmatis namun prinsipil, di mana Al Washliyah mampu menembus dualisme sistem pendidikan nasional melalui jalur Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tanpa kehilangan jati diri ideologisnya. Integrasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum diniyah khas organisasi, serta penerapan standar mutu global seperti ISO 9001:2015, membuktikan bahwa Al Washliyah telah berhasil menciptakan sintesis antara profesionalisme teknokratis dan militansi religius. Secara sosiologis, Al Washliyah di Simalungun telah bertransformasi menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang efektif melalui pembangunan modal sosial dan kepercayaan publik yang kokoh. Dengan mengedepankan prinsip *Wasathiyah* (moderasi), lembaga-lembaga pendidikannya tidak hanya berfungsi sebagai wadah konservasi intelektual-tradisional melalui penguasaan *kitab kuning*, tetapi juga sebagai ruang publik yang inklusif bagi masyarakat heterogen. Strategi ini memungkinkan terjadinya mobilitas sosial vertikal bagi masyarakat pedesaan sekaligus memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman radikalisme di era disrupsi informasi.

Model pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah di Kecamatan Bandar menawarkan paradigma baru dalam pendidikan Islam yang inklusif-progresif. Organisasi ini membuktikan bahwa penguatan wawasan kebangsaan dan loyalitas terhadap negara dapat berjalan selaras dengan pemurnian akidah dan ketaatan beragama. Melalui unifikasi ideologis dan integrasi epistemologis yang dijalankannya, Al Washliyah tetap relevan sebagai pilar stabilitas sosial-keagamaan yang mampu mencetak kader-kader unggul yang memiliki keseimbangan antara kesalehan spiritual dan kompetensi profesional untuk masa depan Indonesia.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai dampak jangka panjang dari integrasi kurikulum diniyah terhadap pola perilaku politik alumni di jabatan publik, serta bagaimana resiliensi ekonomi institusi Al Washliyah di tingkat pedesaan dalam menghadapi persaingan dengan sekolah negeri yang sepenuhnya dibiayai negara. Selain itu, studi mengenai efektivitas literasi digital berbasis nilai-nilai Al Washliyah dalam memitigasi narasi ekstremisme di kalangan generasi Z akan menjadi kontribusi yang sangat berharga bagi pengembangan diskursus pendidikan Islam moderat di masa depan

E. Referensi

- Arikunto, S., & V. I. (n.d.). *3.1 Jenis Dan Sumber Data* (Edisi Revisi). Diakses pada 16 Juni 2026, dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2057/>.
- Aziz, M., Mesiono, M., & Syafaruddin, S. (2019). Kebijakan Majelis Pendidikan Al-Washliyah Dalam Pengembangan Kurikulum Ke-Al Washliyah Madrasah Aliyah Di Sumatera Utara. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 9(1). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/article/view/3102>.
- Bambang. (2026, 7 Juni). *Wawancara pribadi dengan Guru SD Aljamiatul Washliyah Tegal Rejo*.
- Damanik, D., Meidina, A. R., Adlinnas, R., & Azizah, S. N. (2023). Religious Moderation By Organization Of Islamic Al-Jam'iyatul Washliyah (Character, Identity, And Attitude). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(2), 233-244. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.17089>.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Hafni. (2026, 6 Juni). *Wawancara pribadi dengan Guru MtsS Aljamiatul Washliyah*.
- Hanum, L. (2018). Perempuan di Lembaga Pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 2(1), 29-49. <https://doi.org/10.30821/jcims.v2i1.1755>.
- Hidayat, R., Fitri, R. A., & Hermina, D. (2025). Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data Dan Penyimpulan/Pemaknaan, Dan Pelaporan & Evaluasi Penelitian. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 509-23.
- Ja'far, J. (2022). Al Jam'iyatul Washliyah, Agama dan Politik. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 3(1), 1-18. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v3i1.8999>.
- Khamis, M. (2022). *Al Washliyah Menuju 1 Abad: Histori, Ideologi dan Resistansi di Era Disrupsi*. Centre For Al Washliyah Studies.
- Khoirunnisah. (2026, 2 Juni). *Wawancara pribadi dengan Guru SMK Al Washliyah*.
- Kurniawan, R., & Suparto, S. (2025). Dakwah Moderasi dan Kebangsaan: Strategi Al-Jam'iyatul Washliyah dalam Memperkuat Wawasan Kebangsaan di Era Disrupsi. *Ad-DA'WAH*, 23(2), 76-94. <https://doi.org/10.59109/addawah.v23i2.154>.
- Kurniyat, E. (2018). Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1).

<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.669>.

- M.Fil.I, F. A., Mashuri, S., & Jumat, G., dkk. (2026). *Studi Islam Moderat*. Divya Media Pustaka.
- Mahdanil. (2026, 5 Juni). *Wawancara pribadi dengan Guru MAS Aljamiatul Washliyah*.
- Mila, & Supardan. (2026, 8 Juni). *Wawancara pribadi dengan Masyarakat Umum*.
- Möhö, H., Haref, A., & Zai, E. P. (2022). Pancasila Sebagai Staat Fundamental Norm Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(3), 194-203.
- Munir, M. M. (n.d.). *Hegemony Wacana Keagamaan di UIN Walisongo (Analisis Simbiosis Mutualisme Politik Nahdlatul 'Uama dan Muhammadiyah Jawa Tengah di UIN Walisongo Semarang)* (Skripsi). Diakses pada 16 Juni 2026, dari <https://eprints.walisongo.ac.id/15122/1/all%20skripsi%20-%20Misbskhul%20Munir.pdf>.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Mengangun kesadaran inklusif-multikultural untuk deradikalisasi pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 131-51.
- Nisa, K., Ansori, M. A., Andari, A. A., Kholil, M., & Sudarningsih, S. (2024). Al-Jam'iyatul Al-Washliyah Educational Institutions (1930-2000): Existence, Typology of Education, and Its Issues. *Yupa: Historical Studies Journal*, 8(1), 124-139. <https://doi.org/10.30872/yupa.v8i1.3143>.
- Purba. (2026). Analisis Kurikulum Diniyah Al-Washliyah di Madrasah Aliyah Al-Qismu 'Aliy Medan. *Instructional Development Journal*. Diakses pada 16 Juni 2026, dari <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IDJ/article/view/26411>.
- Rambe, R. (2018). Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia pada Era Pra Kemerdekaan. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 2(1).
- Saputra, I. B., & Ramadhani, M. L. (2024). Pemberdayaan Umat Melalui Al-Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 3(12), 1299-1316. <https://doi.org/10.53625/jpm.v3i12.9485>.
- Sinaga, D. (2026, 1 Juni). *Wawancara pribadi dengan Sekretaris GPA Simalungun*.
- Sukmana, O., Machmud, M., Basri, L., dkk. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Konseptual dan Praktis*. Star Digital Publishing.
- Sumantri, S. T., Deliana, N., & Afif, Y. U. (2021). Pendidikan Islam, Modernisasi Dan Kolonialisasi: Transformasi Lembaga Pendidikan Jam'iyatul Washliyah Tahun 1930-1942. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 157-74. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v16i1.4659>.
- Syahnhan, M., & Ja'far, J. (2021). Examining Religious Moderation of the Al-Jam'iyatul

Washliyah Fatwa Council. *Journal of Indonesian Islam*, 15(1), 21-46.
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.1.21-46>.

Syawal. (2026, 3 Juni). *Wawancara pribadi dengan Alumni SMK Al Washliyah*.

Teri. (2026, 4 Juni). *Wawancara pribadi dengan Guru SMP Aljamiatul Washliyah Marihat Bandar*.